

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Barata, Atep Adya. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. (Jakarta: Elex Media Komputindo).
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Transito).
- Widjaja, H.A.W. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/288 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan dan Kelas Jalan Reklame di Kota Semarang;

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 510/202 Tahun 2009 tentang Tata Letak Reklame di Kota Semarang.

Jurnal

Gita Azka Asfara. *Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 di Kota Semarang*, (Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, 2016).

Panji Yudha Niandanu. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang*, (Universitas Diponegoro, Journal of Public Policy and Management Review, Volume 4 Nomor 4, 2015).

Riko Dwi Arnendo. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Kota Semarang*. (Universitas Diponegoro, Journal of Public Policy and Management Review, Volume 7 Nomor 1, 2018).

Singgih Pangestu. *Implementasi Pelayanan Publik tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang*. (Universitas Negeri Semarang, Jurnal, Volume 2 Nomor 1, 2016).

Internet

Website Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
<http://www.distaru.semarangkota.go.id>

Website Pemerintah Kota Semarang <http://www.semarangkota.go.id>

Wawancara

Wawancara Penulis dengan Bapak Gita Affa Arsyada, S.T, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan Gedung Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, pada tanggal 27 Maret 2019.

Wawancara Penulis dengan Ibu Marthika Hanindyah, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, pada tanggal 27 Maret 2019.

LAMPIRAN